ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Oleh:
Sonia Indah Permata
151010088

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Sonia Indah Permata
151010088

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :Sonia Indah Permata

NPM :15010088

Fakultas :Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa **"**Skripsi**"** yang saya buat dengan judul:

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutipdidalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 19 Februari 2020

Materai 6000

Sonia Indah Permata
151010088

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperolah gelar Sarjana

Oleh:

SONIA INDAH PERMATA
151010088

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 14 Maret 2020

KAROL TEOVANI LODAN, S.AP.,M.AP
Pembimbing

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas tentu merupakan cita-cita semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa mutu pendidikan menjadi sangat penting. Pertama, aspek persaingan. Persaingan terjadi baik antar lembaga pendidikan maupun dengan dunia kerja. Saat ini setiap calon tenaga kekrja harus dibekali dengan pendidikan yang bermutu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kedua, munculnya kebebasan dan otonomi bagi institusi pendidikan yang mengharuskan penntingnya kualitas di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan fakta-fakta sosial yang cukup menarik: 1) Tujuan, Kebijakan pengembangan kompetensi dan kualifikasi ini mempunyai tujuan untuk menambah pelatihan-pelatihan kepada guru agar bisa menambah kemampuan dalam segala hal. Tujuan dari kebijakan tersebut bisa dicapai dalam penerapannya di Kota Batam meskipun belum seratus persen. 2) Masalah, masalah yang melatar belakangi Kebijakan pengembangan kompetensi dan kualifikasi ini adalah rendahnya kompetensi dan juga guru yang belum terkualifikasi di Kota Batam. 3) Tuntutan, tuntutan baru yang muncul setelah Kebijakan pengembangan kompetensi dan kualifikasi ini adalah masyarakat mengharapkan supaya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan 4) Dampak, Setelah tujuan kebijakan ini tercapai munculah dampak yang dirasakan guru baik itu dampak positif mauun negatif. 5) Sarana dan Alat kebijakan Bapak Walikota Batam menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi jalannya kebijakan

Kata Kunci : Kebijakan; Pendidikan; Kualitas; Kota Batam.

ABSTRACT

Quality education is certainly the ideals of all parties involved in the world of education. There are at least two important reasons why the quality of education is so important. First, the aspect of competition. Competition occurs both between educational institutions and with the world of work. At present every prospective employment must be equipped with quality education to get better jobs. Secondly, the emergence of freedom and autonomy for educational institutions which requires the importance of quality in every type, line and level of education. The study was conducted to describe and analyze the Office of Education's policy in improving the quality of education in Batam City. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study found interesting social facts: 1) Purpose, Competency and qualification development policy has the aim to add training to teachers so that they can increase their abilities in all matters. The purpose of the policy can be achieved in its application in the city of Batam, although not yet one hundred percent. 2) The problem, the background of this Competency and qualification development policy is the low level of competence and also of unqualified teachers in Batam City. 3) Demands, new demands arising after the Competency and Qualification Development Policy is that the community expects that this policy can run as expected. 4) Impact, After the policy objectives are reached, the positive and negative impacts of the teacher arise. 5) Policy Tools and Tools The Mayor of Batam uses his power and authority to regulate and oversee the course of the policy

Keywords: Policy; Education; Quality; Batam city

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segara rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP,.M.AP selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, fikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam
5. Bapak / Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritikan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Hendri Arulan, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

7. Bapak Arios Z. Sandry, S.Kom selaku Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8. Ibu Nurmala, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 018 Sagulung.
9. Ibu Nur Azizah Marpaung, S.Ag selaku Guru SD Negeri 018 Sagulung.
10. Ibu Rini Sandra Oktavia, S.Pd selaku Guru SD 018 Sagulung.
11. Narasumber penulis dalam melakukan penelitian ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
12. Kedua orang tuaku Alm. Bapak Alfiker dan Ibunda Yulita Elvia yang penulis sayangi dan hormati yang selalu memberikan doa yang tulus untuk anak tersayang Sonia Indah Permata serta motivasi dan dukungan baik secara materil maupun moril.
13. Hendra Andika dan Alif Putra Andika yang penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan support yang luar biasa untuk pembuatan skripsi ini
14. Sahabat-sahabatku seperjuangan Administrasi Negara 2015 yang selalu memberikan semangat, motivasi, membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dan selalu memberikan kenangan indah dimasa-masa bersama.

Batam, Februari 2020

Sonia Indah Permata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABLE ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan penelitian 8
1.4. Manfaat penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Teori Dasar 10
2.1.1. Kebijakan Publik 10
2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 10
2.1.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik 11
2.1.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 12
2.1.1.4 Unsur-Unsur Kebijakan Publik 15
2.1.2 Analisis Kebijakan 16
2.1.3 Kebijakan Pendidikan 19
2.1.3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan 19
2.1.4. Kompetensi Tenaga Pendidik 23
2.1.5. Kualifikasi Tenaga Pendidik 26
2.2 Penelitian Terdahulu 28
2.3 Kerangka Pemikiran 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1. Jenis Penelitian 36
3.2. Fokus Penelitian 36
3.3. Sumber Data 37
3.4 Metode Analisis Data 40
3.5.Keabsahan Data 41
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
4.1. Hasil Penelitian 44
4.1.1. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kota Batam 44
4.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam 45
4.1.3. Stuktur Oganisasi Dinas Pendidika Kota Batam 52
4.1.4 Profil Pegawai Dinas Pendidikan Kota Batam 53
4.1.5 Kualifikasi Dan Kompetensi Guru Di Kota Batam 54

4.1.6 Analisis Kebijakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Batam 59
4.2. Pembahasan 72
4.2.1. Analisis Kebijakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Batam 72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 77
5.1 Simpulan 77
5.2. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Wawancara dan Dokumentasi
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Guru Kota Batam 4
Table 1.2 Jumlah Sekolah Dasar Negeri Di Kota Batam 5
Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 6
Tabel 1.4 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik Kota Batam 7
Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu 32
Tabel 3.1 Informan Penelitian 39
Tabel 4.1 Hasil Uji Kompetensi Guru Di Kota Batam Tahun 2019 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik 13
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 35
Gambar 3.2 Jadwal Penelitian 43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam 52
Gambar 4.2 Profil Pegawai Dinas Pendidikan Kota Batam 53
Gambar 4.2 Jumlah Tenaga Pendidik SD Kota Batam 55
Gambar 4.3 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik SD Kota Batam 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas sistem pendidikan secara Kaffah (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja (Faris. N, 2010; 28). Kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya sangat banyak yang mengalami mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya. Kondisi yang demkianlah yang membuat pemerataan pendidikan sembilan tahun belum dapat dituntaskan, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutunya.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan, antara lain adalah permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah *(shortage)*, distribusi tidak seimbang *(unbalanced distribution)*, kualifikasi dibawah standar *(under qualification)*, kurang kompeten *(low competencies)*, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu *(mismatched)*. Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana prasarana belum

memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masing sangat kurang.

Pendidikan yang berkualitas tentu merupakan cita-cita semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa mutu pendidikan menjadi sangat penting. Pertama, aspek persaingan. Persaingan terjadi baik antar lembaga pendidikan maupun dengan dunia kerja. Saat ini setiap calon tenaga kekrja harus dibekali dengan pendidikan yang bermutu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kedua, munculnya kebebasan dan otonomi bagi institusi pendidikan yang mengharuskan penntingnya kualitas di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Tentu saja untuk memberikan pendidikan yang bermutu tidak semudah membalikkan telapak tangan, setiap tahun ke tahun salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2010) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-109 (2019).

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu tujuan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai mutu atau kualitas pendidikan, tentu diperlukan peran dari berbagai pihak yang terkait. Salah satunya adalah peran tenaga pendidik atau guru. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyatakan, guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi dan kualifikasi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 10 Ayat (1) menyatakan, kompetensi guru sebagaimana dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Agar kualitas peserta didik meningkat, maka kualitas guru juga perlu ditingkatkan. Tugas guru di masa depan akan semakin berat, jika kualitas profesionalisme guru tidak ditingkatkan. Dampaknya adalah rendahnya kualitas pendidikan, seperti tidak maksimalnya kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan, tidak sempurnanya kemampuan pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki tiap siswa, dan rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa terutama pada tingkat sekolah dasar. Jadi, semakin guru memiliki profesionalisme tinggi akan berdampak baik bagi perkembangan diri siswa.

Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya (Sobri, 2016). Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang

berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan (Supriadi, 2013). Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya tenaga guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan amanat undang-undang dilingkungan pemerintahan Kota Batam, berikut adalah data guru Kota Batam berdasarkan Dapodikdasmen, 2019:

Tabel 1.1
Jumlah Guru Kota Batam 2019

No	Wilayah	Total			SD			SMP		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Batam Kota	1750	503	1247	1139	306	833	611	197	414
2	Kec. Sagulung	1409	360	1049	991	248	743	418	112	306
3	Kec. Batu Aji	1085	263	822	797	176	621	288	87	201
4	Kec. Sekupang	961	285	676	628	164	464	333	121	212
5	Kec. Bengkong	697	193	504	502	132	370	195	61	134
6	Kec. Lubuk Baja	627	203	424	422	127	295	205	76	129
7	Kec. Nongsa	601	172	429	427	111	316	174	61	113
8	Kec. Sei Beduk	520	169	351	404	125	279	116	44	72
9	Kec. Batu Ampar	289	109	180	192	69	123	97	40	57
10	Kec. Galang	289	137	152	218	108	110	71	29	42
11	Kec. Belakang Padang	218	86	132	159	64	95	59	22	37
12	Kec. Bulang	134	61	73	91	48	43	43	13	30
Total	**Total**	**8580**	**2541**	**6039**	**5970**	**1678**	**4292**	**2610**	**863**	**1747**

Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Ajaran 2018/2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah seluruh guru dari SD sampai dengan SMP di Kota Batam sebanyak 8580 guru, dimana 5970 guru adalah guru sekolah dasar (SD) dan 2610 guru adalah guru sekolah menengah pertama (SMP). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa guru dengan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi, baik di SD maupun di SMP dengan jumlah 6039

berjenis kelamin perempuan sedangkan guru berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2541 orang .

Selain untuk jumlah guru juga diperkuat dengan data sekolah dasar negeri berdasarkan dengan wilayah yang ada di Kota Batam,berikut rincian table sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sekolah Dasar Negeri Di Kota Batam

No	Wilayah	Bentuk Pendidikan	Jumlah
1	Kec. Sagulung	SD	21
2	Kec. Batu Aji	SD	8
3	Kec. Sekupang	SD	13
4	Kec. Bengkong	SD	12
5	Kec. Lubuk Baja	SD	9
6	Kec. Nongsa	SD	12
7	Kec. Sei Beduk	SD	9
8	Kec. Batu Ampar	SD	4
9	Kec. Galang	SD	23
10	Kec. Batam Kota	SD	11
11	Kec. Belakang Padang	SD	16
12	Kec. Bulang	SD	10
Total			**148**

Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Ajaran 2018/2019*

Berdasarkan jumlah guru dan sekolah tersebut, Masih banyaknya tenaga guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	SD	654	237	198	164	5872	11	0	7.136
2	SMP	302	116	119	198	1521	53	1	2.310
Total		**1.010**	**451**	**415**	**433**	**8,602**	**167**	**3**	**11.081**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Ajaran 2018/2019

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah terbesar yang belum terkualifikasi S1/ DVI dengan rincian guru sekolah dasar dengan jumlah 1.253 orang guru, dari jumlah guru yg belum terkualifikasi sebanyak 654 orang guru berpendidikan setara SMA, 237 orang guru berpendidikan D1 dan 362 orang guru masih berkualifikasi D2 dan D3. Dari data tersebut mengindikasikan lemahnya pemetaan kebutuhan tenaga guru ditingkat sekolah dasar yang merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru di tingkat sekolah dasar di Kota Batam.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam pasal 8 menunjukkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sedangkan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Hal ini menjadi agenda yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah karena hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Batam terutama ditingkat sekolah dasar (SD). Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan memperbaiki Kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru. Dan terkait upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut pemerintah daerah Kota Batam juga mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui peraturan daerah mengenai pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 3 tahun 2019 pasal 57 ayat (2) yang menyatakan Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik sesuai dengan kompetensi. Lahirnya Peraturan daerah ini disebabkan karena Kota Batam juga menghadapi masalah terkait dengan kompetensi guru yang masih belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal seperti yang diamanat oleh UU No 14 tahun 2005.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa meningkatkan kualitas pendidikan secara layak yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi kompetensi guru, artinya salah satu faktor penunjang peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan memperhatikan kompetensi guru.

Berikut adalah data uji kompetensi Guru di Kota Batam tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik Kota Batam

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	SD	SMP	Peda gogik	Profes ional	Rata-Rata
520	316000	Kota Batam	58.71	61.56	55.63	62.71	59.65

Sumber : Kemendikbud 2019 (https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg)

Dari tabel diatas menjelaskan nilai uji kompetensi guru (UKG) masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata ujian kompetensi guru masih dibawah 70 dari nilai maksimal 100. Mengacu pada Pasal 54 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar adalah Calon Pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak nilai kompetensi guru yang masih rendah dari target rata-rata di angka 70.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Batam telah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan dari segi kompetensi guru mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 dan peraturan daerah kota Batam tentang penyelenggaraan pendidikan dasar. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang dapat dilakukan "**Analisis Kebijakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Batam**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis.

   Skripsi ini dapat memberikan kontribusi, rekomendasi, dan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Secara Praktis.

   Skripsi ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Kota Batam.

a. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualifikasi dan kompetensi guru.

b. Bagi Pemerintah Kota Batam

Untuk pemerintah bisa menggunakan penelitian ini sebagai saran untuk perbaikan kedepan dengan memperhatikan kualitas pendidikan Kota Batam.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil peneilitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa yang ingin mencari tahu tentang penelitian kebijakan publik di bidang pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Winarno, (2012) secara umum, istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sementara itu, Rose (Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Menurut Agustino, (2012:7) yang berbunyi kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah ataupejabat pemerintah saja. Menurut Riko Riyanda, 2017, Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.

Menurut Syafiie, 2016 dalam Tahir, 2014, Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya

memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi serta pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak.Pedoman itu bisa sajaamat sederhanaatau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atausempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatifatau kuantitatif, publik atau privat.Kebijakan dalam maknanya sepertiberupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak,suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenaiaktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana"(Wahab,2012:9)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (aunique activity), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain, sebagai berikut (Wahab, 2016: 20-24):

1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, daripada sekedar bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan secara kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, seperti kebijakan pembangunan

atau kebijakan sosial dalam sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan yang asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).

2) Kebijakan pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3) Kebijakan adalah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4) Kebijakan publik mungkin bersifat positif, mungkin pula bersifat negatif. Dalam sifatnya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian masalah tertentu. Sementara dalam sifatnya yang negatif, kebijakan publik dapat meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang sebenarnya campur tangan pemerintah itu sanagat diperlukan.

2.1.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik unsur yang paling inti adalah proses. Sebagai sebuah proses, kebijakan publik dapat dilihat sebagai kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak

proses maupun variabel yang harus diperhatikan. Menurut Winarno, (2016: 30-31) tahap-tahap kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:

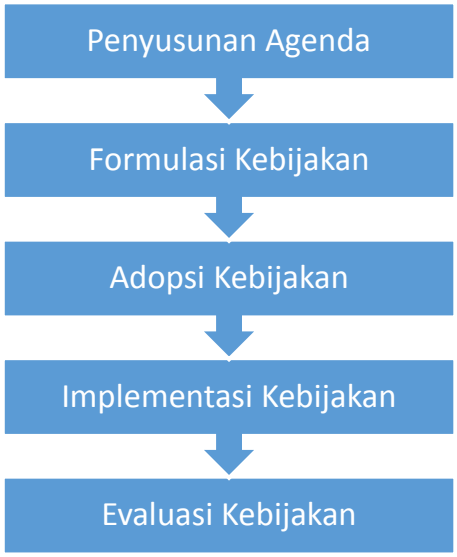

Gambar 2.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Sumber: Winarno (2016: 30-31)

1) Tahap penyusunan agenda

   Pada tahap dipilih dan ditetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah yang ada akan diseleki terlebih dahulu. Selanjutnya, beberapa masalah akan dipilih dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah mungkin tidak akan sentuh sama sekali pada tahap ini, dan masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini agenda yang menjadi masalah dan telah masuk agenda kebijakan akan dibahas oleh para pebuat kebijaka. Dilakukan pendefinisan masalah yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatif/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

   Akan di lakukan adopsi terhadap salah satu aternatif kebijakan yang telah ditawarkan oleh para perumus kebijakan. Alternatif yang dipilih akan di adobsi berdasrkan kesepakatan bersama.

4) Tahap implementasi kebijakan

   Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit adminstrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karrena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.1.4 Unsur - Unsur Kebijakan

Unsur-Unsur kebijakan Abidin (2012:25-33) dilihat dari segi struktur

a. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa sebuah kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan.

b. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

c. Tuntutan

Tuntutan muncul karena sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena kebutuhan baru yang muncul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

d. Dampak

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.

e. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Analisis Kebijakan

Patton dan sawicki (Fattah, 2014:3) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Selanjutnya Duncan Macrae (Fattah, 2014:3) mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni (Winarno, 2016: 226):

1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakatan yang pantas.

2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dengan menggunakan metode ilmiah.
3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Mengacu pada Dunn (Suharto, 2012:85-86), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

1. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ suatu kebijakan diterapkan.
2. Model retropektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan.
3. Model integratif adalah model perpaduan anatara dua model diatas. Model ini kerap disebut model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diimplementasikan.

Dalam penelitian ini mengacu pada model proktif karna dinilai lebih tepat dalam menjabarkan kualitas pendidikan dalam hal kebijakan kompetensi dan kualifikasi.

Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli:

1. Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
2. Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh (Mudjia Rahardjo, 2010; 3) yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu a. kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, b. kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, c. kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, d. kebijakan sebagai sutau strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, e. kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, f. kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, g. kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, h. kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.
3. Pendapat Koontz dan O‟Donell dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 Kebijakan Pendidikan

Menurut Gamage dan Pang (Hasbullah, 2015: 41), kebijakan pendidikan dapat juga dipahami sebagai perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substantif. Garis panduan dimaksud mencakup istilah umum (*general terms*), dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah yang ada. Garis panduan atau kebijakan pendidikan akan menjadi kepala sekolah, staf, dan personalia lainnya sebagai warga sekolah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan arah yang jelas.

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan

Penerapan kebijakan pendidikan yang optimal dipengaruhi oleh banyak faktor. Sulit untuk mengidentifikasi mana faktor atau kondisi yang paling memfasilitasi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Hal ini karena keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh baik faktor politik, ekonomi, dan konteks sosial (Cerna, 2013:17). Berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan telah dilaporkan pada sejumlah hasil penelitian maupun kajian. Solichin (2015:156) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi: 1) faktor yang terletak pada rumusan kebijakan itu sendiri, misalnya kejelasan rumusan, ketepatan sasaran, kemudahan interpretasi, dan pelaksanaannya; 2) faktor pelaksana yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kemampuan kerjasama masing-masing personil pelaksana kebijakan; dan 3) faktor sistem organisasi pelaksana yaitujaringan sistem, hirarki, kewenangan masing-

masing peran, model distribusi pekerjaan, gara kepimpinan, serta tahapan monitoring dan evaluasi yang digunakan. Berikut dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan

   Globalisasi di masa kini mempercepat dan mempermudah orang-orang dalam melakukan pergerakan, sebagaimana juga pergerakan layanan, modal, barang, pemikiran, dan pengetahuan antar negara di seluruh dunia. Globalisasi telah membuat seluruh dunia menjadi seperti wilayah yang kecil karena batasan-batasan antar negara telah semakin mudah untuk dilalui, dengan adanya kemajuan teknologi yang menjadi penghubung antar negara. Sistem-sistem nasional, termasuk juga pendidikan sangat terpengaruh oleh adanya globalisasi. Al'Abri (2011:491) telah melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan pendidikan di sejumlah negara berkembang dan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang turut dibentuk ulang oleh adanya globalisasi.

2. Pengaruh Kondisi Negara Berkembang terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan

   Pada banyak negara berkembang, kontrol pengeluaran ex-antar serta proses yang panjang untuk menyetujui pengeluaran, menyulitkan kementerian pendidikan untuk segera menanggapi keadaan yang berubah. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek reformasi pendidikan, terutama yang membutuhkan dana kontingensi dalam jumlah besar untuk segera dikirim saat proyek berlangsung (Rondinelli dkk., 2010:107). Selain itu,

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam waktu bersamaan seringkali menyebabkan sulitnya penentuan prioritas. Dengan sedikitnya waktu, pemerintah lebih sulit untuk mempersiapkan suatu kebijakan dan rencana tindakan yang akan dilakukan.

3. Pengaruh Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan

   Aparatur negara yang berperan dalam pembentukan dan penerapan kebijakan pendidikan juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan pendidikan itu sendiri. Bolaji et al. (2015:61) menyebutkan bahwa efisiensi kerja dan kompetensi aparatur negara yang menerapkan kebijakan pendidikan sangat penting, karena jika tidak maka dapat memicu kegagalan kebijakan tersebut seperti yang terjadi di Nigeria.

4. Pengaruh Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan

   Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu elemen pelaksana kebijakan pendidikan. Implementasi dari kebijakan pendidikan dan segala inovasi yang dibuat di sekolah memerlukan dukungan dari orang-orang pelaksananya, meliputi interaksi personal, pengalaman melalui pelatihan dalam jabatan, dan bentuk dukungan lainnya. Sejumlah penelitian telah mengungkap dari waktu ke waktu bahwa peranan pelaksana kebijakan ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan tidak mampu digantikan oleh apapun dan peranan tersebut sangat penting. Pembuat kebijakan yang merencanakan suatu bentuk penyelesaian masalah menggantungkan

keberhasilan kebijakan tersebut salah satunya kepada pelaksana (implementer) yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Jika penerapan suatu kebijakan yang baru tidak lancar, misalnya sulit menggantikan kebijakan lama, komunikasi yang baik antar personal dan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana sangat dibutuhkan (Fullan & Pomfret, 2010:391).

5. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan

   Banyak kepustakaan yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pendidikan tidak sampai melebihi bentuk “supporter” atau pendukung sekolah, misalnya berkontribusi dalam penyediaan biaya dan tenaga kerja, serta memastikan bahwa siswa benar-benar mengikuti kegiatan sekolah. Implementasi dari suatu kebijakan pendidikan merupakan rantai yang kompleks dari interaksi timbal balik antara kementerian sebagai pembuat kebijakan dan birokrat di tingkat pelaksana yaitu sekolah dan masyarakatnya. Permasalahan dalam pendidikan tidak akan dapat diselesaikan jika orang tua siswa dan masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Harus ada pengembangan kepemimpinan yang kuat untuk membangun hubungan dan menjembatani antara sekolah dan masyarakat bersama-sama. Menyekolahkan siswa murni merupakan keputusan yang diambil oleh orang tua. Dengan demikian perlu juga dipahami bagaimana faktor sosial budaya dan ekonomi mereka.

2.1.4 Kompetensi Tenaga Pendidik

Kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan pada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kompetensi menjadi tuntutan mutlak pada tugas dan tanggung jawab yangmenjadi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dengan menyimak makna kompetensi maka dapat dimaklumi jika kompetensi itu dipandang sebagai pilarnya atau teras kinerja dari suatu profesi.Kompetensi merupakan gambaran hakekat kualitatif dan perilaku guru yang tampak sangat berarti. Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dibertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan (Rahman Getteng, 2014:8).

Guru adalah sebuah jabatan akademik yang memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Mahmud, 2012:19).

Kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh guru yang diindikasikan dalam tiga kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru, kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya, dan kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (Hamzah B. Uno, 2010:9).

Standar kompetensi pendidik/guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik

   Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi:

   a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
   b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran.
   c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
   d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
   e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
   f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
   g. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan siswa.
   h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

2. Kompetensi Kepribadian

   Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta dapat menjadi tauladan bagi peserta didik meliputi:

   a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampauan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar meliputi:

a. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
b. Beradaptasi di tempat di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.
c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam meliputi:

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

2.1.5 Kualifikasi Tenaga Pendidik

Proses berjalannya kegiatan belajar mengajar, tugas seorang pendidik adalah menjadi sentral, dalam arti dia harus mampu mengkoordinir peserta didik, mampu menguasai kelas secara keseluruhan, dan jelas diharuskan pula menguasai apa yang menjadi materi pembahasan dalam pembelajaran dengan tentunya mengacu pada kurikulum yang telah ditentukan. Sebenarnya tidak hanya itu saja yang menjadi tugas seorang pendidik, karena masih banyak lagi tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab pendidik. Posisi yang begitu sentral pada seorang guru dalam menjalankan proses belajar mengajar maka dibutuhkan standar kualifikasi tenaga pendidik dalam proses pengadaan dan pengangkatannya, karena itu sangatlah berpengaruh dalam pengembangan dunia pendidikan dan pemberdayaan kompetensi tenaga pendidik kelak (Sobri, 2016).

Standar kualifikasi menjadi guru adalah salah satu syarat penting untuk menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu memiliki basis keilmuan dan teori tertentu. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui proses pendidikan dan persiapan yang cukup lama dilakukan melalui seleksi secara terus menerus. Karena itu sebagai guru profesional guru harus diuji kemampuan-kamampuan teknisnya yang berkaitan dengan kemampuan pedagogis, kemampuan profesional,

kemampuan komunikasi, kemampuan kepribadian, dan kemampuan sosial (Mahmud, 2012).

Kualifikasi merujuk kepada syarat formal yang harus diselesaikan melalui aktivitas akademik tertentu dan itu dibuktikan dengan ijazah atau setifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu. Kualifikasi bersifat statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang dibuktikan dengan pemberian ijazah atau sertifikat tidak berubah sejauh yang bersangkutan menyandang gelar akademik yang sesuai. Orang yang menyandang gelar S1 dianggap sebagai sarjana dan layak untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu (Rosmarita, 2106).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 9, pasal 8 dan pasal 9 serta Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut merupakan dasar untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan profesinya. Di sisi lain bagi guru atau pendidik, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pendorong untuk selalu meningkatkan diri agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dimasa datang. Tanpa adanya upaya pengembangan diri untuk meningkatkan profesi, maka penigkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tumpang tindih dan tidak optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara komprehensif meliputi unsur sarana dan prasarana (termasuk di dalamnya kurikulum), tenaga pengajaran (tenaga pendidik), tenaga administrasi

(tenaga kependidikan) dan kesemuanya itu akan berhasil bila terdapat adanya dukungan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Dissas (2017) dengan judul penelitian Analisis Kebiajkan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. Dan hasil penelitiannya adalah dengan adanya kebijakan pendidikan menegenai pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hokum, serta dengan adanya pendidikan profesi guru, guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalisme sebagai guru.
2. Penelitian yang dilakukan Nuraidah, (2013) dalam penelitian yang berjudul kompetensi profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah ibtidaiyah negeri sei agul medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesional guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. dan Upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan professional guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan adalah dengan meningkatkan kompetensi guru melalui kursus dan diklat, pengadaan sumber dan media Pembelajaran, mengelola lingkungan belajar, penerapan e-learning, dan controling.
3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono & Minto Hadiyang, (2010) dalam Jurnal Administrasi Publik

(JAP), Vol. 13, No. 1, yang berjudul Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang), Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukkan serta pengawasan akan program dana BOS.

4. Devita Ayu Nuridah Sari, Andy Fefta Wijaya & Siswidiyanto (2014) dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, dengan judul Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2009-2014). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berjalan dengan baik. Pengorganisasian anggaran dari APBD juga dapat dialokasikan dengan baik. Namun jika dilihat hasil kinerjanya melalui indikator kinerja sesuai dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan data IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kota Malang, menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja ada peningkatan pada 9 indikator dan 6 indikator lainnya mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012, sebesar 40% dari indikator kinerja tersebut masih mengalami

penurunan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting dan perlu untuk lebih diupayakan lagi melalui peningkatan kinerja sesuai dengan kebijakan yang telah disusun.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jensanaris Soska Farhanti (2014) dengan judul "Kebijakan Mutu Di Sekolah SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta". Masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu tentang unsur kebijakan mutu di SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta solusi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan mutu di SD Muhammadiyah Suronatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah kepala sekolah, koordinator bidang di sekolah, karyawan dan siswa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi (2018) dengan judul "implementasi kebijakan pemerataan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan". Implementasi kebijakan pemerataaan guru yang meliputi analisis lingkungan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian yang prima dapat meningkatkan mutu pendidikan karena sudah terpenuhinya kebutuhan guru yang mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Dari hasil penelitian ini maka perlu direkomendasikan beberapa hal, diantaranya; diperlukan Undang Undang tentang profesi guru sebagai pedoman guru dalam melakukan tugasnya secara profesional,

perlu diadakan pelatihan terhadap guru dalam meningkatkan profesionalitas yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang akan diberikan.

7. Muyahed hiley & Soenarto (2013) Analisis Kebijakan Pengembangan Sekolah Lukmanulhakeem Yala Thailand. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1. Perencanaan kebijakan pengembangan sekolah belum efektif, 2. Berbagai input pengembangan sekolah sudah mencukupi kebutuhan warga sekolah, 3. Pelaksanaan kebijakan sekolah terkendala karena kebijakan yang tidak komprehensif, 4. Outcome kebijakan berdampak negativ, sehingga sekolah tidak mengembangkan sesuai kapabilitas yang dimiliki.

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu

NO	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Penelitian	Metode & Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru	Dissas (2017)	Hasil penelitian adalah dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisis guru semakin dinaungi oleh sumber hukum, serta dengan adanya pendidikan profesi guru, guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalisme sebagai guru.	Kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah	Menganilisis Kebijakan
				Teori : Berdasarkan UUD 1945	Membahas Profesional Guru
				Pemerataan Mutu Pendidikan	Kualitas Pendidikan
2	Kompetensi Profesional Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan.	(Nuraidah, (2013)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesional guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. dan Upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan professional guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan adalah dengan meningkatkan kompetensi guru melalui kursus dan diklat, pengadaan sumber dan media Pembelajaran, mengelola lingkungan belajar, penerapan e-learning, dan controling	Hasil atau prestasi darri pelaksanaan kebijakan	Sumber Data Primer, Dan Sekunder
				Teori kebijakan pendidikan menegenai pengembangan dan peningkatan profesi guru	Metode Penelitian : Kualitatif
				Fokus Penelitian Peningkatan Profesi Guru	Membahas Kebijakan Pendidikan
3.	Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional	(Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono &	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses	Kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, dan	Fokus Penelitian : Kualitas Pendidikan

NO	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Penelitian	Metode & Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang),	Minto Hadiyang, 2010)	pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukkan serta pengawasan akan program dana BOS.	infrastruktur	
				Teori : *Information and Communications Technology* (ICT)	Teknik Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi
				Pengelolaan guru SDN	Primer Dan Sekunder
4.	Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2009-2014).	(Devita Ayu Nuridah Sari, Andy Fefta Wijaya & Siswidiyanto, 2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berjalan dengan baik. Pengorganisasian anggaran dari APBD juga dapat dialokasikan dengan baik. Namun jika dilihat hasil kinerjanya melalui indikator kinerja sesuai dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan data IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kota Malang	Model Peningkatan Mutu Faktor Empat	Bertujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan
				Peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan	Observasi, Wawancara,
				Fokus Penelitian : Pencapaian akreditasi	Sumber Data : Primer Dan Sekunder
5	Kebijakan Mutu Di Sekolah SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta	(Jensanaris Soska Farhanti, 2014)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah kepala sekolah, koordinator bidang di sekolah, karyawan dan siswa.	Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta,	Sumber Data Primer, Dan Sekunder
				Teori : Berdasarkan UUD 1945	Metode Penelitian : Kualitatif
				Fokus Penelitian Peningkatan Guru	Kebijakan Pendidikan
6	Implementasi	(Citra Dewi, (2018)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini	Implementasi	Meningkatkan

NO	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Penelitian	Metode & Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan		adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	Kebijakan	kualitas Pendidikan
				Penelitian di SMK	Kualitatif.
				Pemerataan guru	wawancara dan dokumentasi
7	Analisis Kebijakan Pengembangan Sekolah Lukmanulhakeem Yala Thailand	Muyahed hiley & Soenarto (2013)	Metode kualitatif dengan jenis pendekatana deskriftif studi kasus.	Kebijakan pengembangan Sekolah	Kualitatif
				Lokasi Penelitian	Menganalisis kebijakan
8	Analisis Kebijakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Batam	(Sonia Indah Permata, 2019)	Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Membahas tentang Kompetensi dan Kualifikasi	Kebijakan Pendidikan
					UU No.14 Tahun 2005

2.3 Kerangka Pemikiran

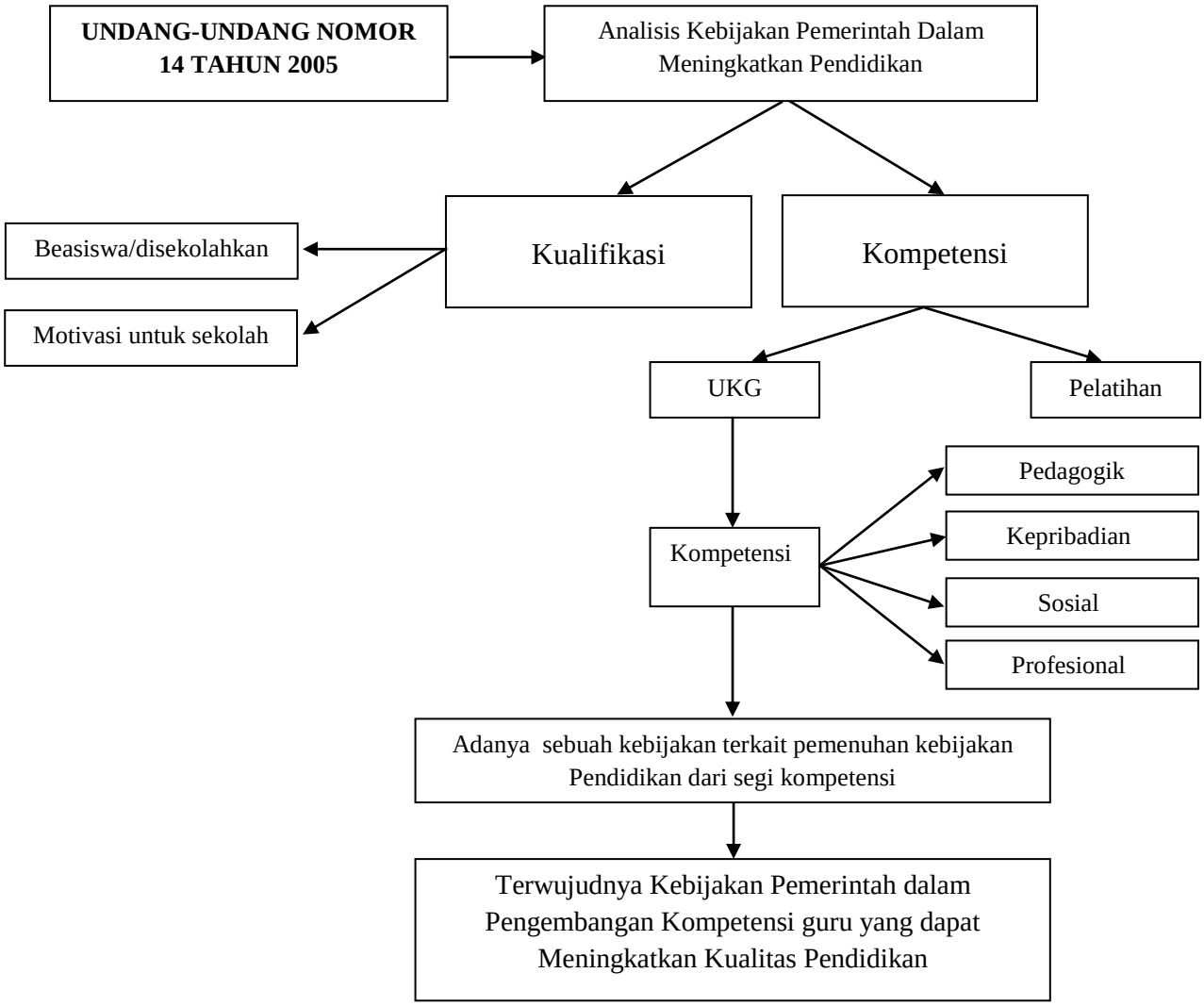

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan peran pemerintah Kota Batam melalui kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan peneliti akan mengindentifikasi faktor-faktor yang yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dari segi kompetensi dan kualifikasi guru. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka relevan jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (Sugiyono, 2014:209), adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Karena adanya keterbatasan tenaga, dana dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus maka peneliti tidak akan melakukan penelitian secara keseluruhan mengenai kebijakan Kualitas Pendidikan di Kota Batam. Maka peneliti akan memfokuskan penelitian tentang

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kota Batam yang mengacu pada aspek kompetensi dan kualifikasi, yang difokuskan pada :

a. Tujuan kebijakan
b. Masalah
c. Tuntutan
d. Dampak
e. Saran atau alat kebijakan

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014: 215), dinamakan *"social situation"* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat *(place),* pelaku *(actor),* dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiyono, 2014) :

1. Data primer, berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Dalam penelitian ini informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut merupakan kriteria narasumber atau informan yang di pilih dalam penelitian ini :
    a. Informan benar-benar mengatahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau di luar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.

b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

c. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

2. Data sekunder, sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2014:222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

   a. Memasuki lokasi penelitian *(getting in)*

   b. Berada dilokasi penelitian *(getting along)*

   c. Pengumpulan data *(logging data)*

   Ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

   a. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Dinas Pendidikan Kota Batam serta guru dan masyarakat di Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Informan yang dijadikan narasumber adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN	ALASAN PEMILIHAN INFORMAN
1.	Hendri Arulan	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Penanggungjawab permasalahan terkait kebijakan yang diambil dalan menanggapi kompetensi dan kualifikasi
2.	Nila Desmini Indriani	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pemetaan tentang permasalahan terkait kebijakan pendidikan Kota Batam
3	Nataniel Suryanto	Sub Bag Perencanaan Dinas Pendidikan	Mengetahui keadaan pendidikan di Batam dengan segala keterbatasan.
4	Arios Z.Sandry	Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengetahui data dan permasalahan mengenai kompetensi dan kualifikasi
5	Nurmala, S.Pd	Kepala Sekolah SD N 018 Sagulung	Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari kompetensi dan kualifikasi.
6	Nur Azizah Marpaung, S.Ag	Guru SD N 018 Sagulung	Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari kompetensi dan kualifikasi.
7	Rini Sandra Oktavia,S.Pd	Guru SD N 018 Sagulung	Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari kompetensi dan kualifikasi.

b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktifitas dalam analisis ini meliputi:

a. Data *reduction* (reduksi data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal- hal pokok, memfokuskan pada bagian-bagian yang penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

b. Data *display* (penyajian data)

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubuungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.5 Keabsahan Data

Menurut Moeleong (2010: 320) Pemeriksaan terhadap keabsahan data padadasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Penerapan uji kredibilitas disini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat trigulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

   Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu / situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya (Sugiyono, 2014:127).

Derajat keteralihan atau *Transferability* merupakan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dalam situasi lain. Oleh karena itu, orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*) maka laporan tersebut memenuhi standar *transferabilitas*, Sanafiah Faisal dalam(Sugiyono, 2014:277)).

Dalam penelitian kualitatif uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti, Sanafiah Faisal (Sugiyono, 2014:277)).

3.6 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi

Untuk lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam yang beralamat di Komplek Perkantoran Sekupang, Jalan Pramuka, Kota Batam. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai

Analisis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Batam.

b. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020			
1.	Studi Pustaka																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Pengumpulan Data																				
4.	Pengolahan Data																				
5.	Analisa Hasil Penelitian																				
6.	Penyusunan Laporan																				
7.	Penyerahan Laporan																				
8.	Sidang Hasil																				

Gambar 3.2 Jadwal Penelitian